

# **RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (R-LPPD)**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sumber segala hikmat dan ilmu pengetahuan yang telah memberikan kemampuan sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah maka Bupati Morowali Utara berkewajiban menyusun sekaligus menyampaikan laporan ini sebagai laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tengah tentang perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023. Di samping itu, laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyampaian laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Morowali Utara. Dukungan dari pemerintah pusat dalam mendorong kemajuan pembangunan di daerah ini sangatlah diharapkan.

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Tim Penyusun yang telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas untuk membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini. Semoga karya pengabdian kita akan senantiasa diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dapat memberi manfaat bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara yang kita cintai dan banggakan.

## **A. Capaian Kinerja Makro**

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel indikator kinerja makro sebagai berikut :

### Indikator Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,48	68,97	0,49
2	Angka Kemiskinan	13,90	12,85	-1,32
3	Angka Pengangguran	2,98	2,24	-0,74
4	Pertumbuhan Ekonomi	10,59	36,42	25,83
5	Pendapatan Perkapita	10,04	14,6	4,56
6	Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)	0,301	0,269	-0,03

## B. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

### Urusan Pendidikan

No	OPD Pelaksana	IKK		Rumus/Persamaan	Capaian Kinerja
		Out come	Output		
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{3.673}{4.602} \times 100\%$ <p>Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD 3.673</p> <p>Jumlah anak usia 5-6 tahun di Kab. Morowali Utara 4.602</p>	87,39 %
			1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Terakreditasi di Kab. Morowali Utara 79 Lembaga	79 Lembaga
			2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima Perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik PAUD Negeri dan swasta yang menerima Perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 5573	5573
			3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD Negeri dan swasta yang menerima pembebasan biaya pendidikan. 1745	1745
			4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD Negeri dan swasta 110	110
			5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Jumlah pendidik pada PAUD Negeri dan swasta 55	55
			6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini 73	73
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta)	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) 50	50	
		. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		$\frac{12.050}{13.806} \times 100\%$ <p>Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar 12.050</p> <p>Jumlah anak usia 7-12 tahun di Kab. Morowali Utara 13.806</p>	88 %
			1. Jumlah SD Negeri dan Swasta Terakreditasi	Jumlah SD Negeri dan swasta Terakreditasi 138	138
			2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar Negeri dan swasta yang menerima	12.752

		(Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah	pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah 12.752	
		3. Jumlah Peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	Jumlah Peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah 5.226	5.226
		4. Jumlah Peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah Peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan di kabupaten morowali utara 12.752	12.752
		5. Jumlah peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan di Kabupaten Morowali Utara 5.226	5.226
		6. Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) 505	505
		7. Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Swasta dan Negeri)	Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Swasta dan Negeri) 588	588
		8. Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) 839	839
		9. Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) 591	591
		10. Jumlah Kebutuhan Minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah Kebutuhan Minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 505	505
		11. Jumlah Kebutuhan Minimal tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah Kebutuhan Minimal tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) 221	221
		12. Jumlah Tenaga kependidikan pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah Tenaga kependidikan pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) 839	839
		13. Jumlah Tenaga kependidikan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah Tenaga kependidikan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) 591	591
		14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik di Kabupaten Morowali Utara 424	424

			15. Jumlah pendidik pada jenjang menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik.	Jumlah pendidik pada jenjang menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik di Kabupaten Morowali Utara 191	191
			16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Swasta dan Negeri) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Swasta dan Negeri) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 128	128
			17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 39	39
			18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat 7	7
			19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat 14	14
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama 5.226 -----X 100% Jumlah anak usia 13 -15 tahun di Kab. Morowali Utara 7.577	73,60 %
			1. Jumlah SD Negeri dan Swasta Terakreditasi	Jumlah SD Negeri dan swasta Terakreditasi 138	138
			2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar Negeri dan swasta yang menerima pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah 12.752	12.752
			3. Jumlah Peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	Jumlah Peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah 5.226	5.226
			4. Jumlah Peserta didik pada jenjang sekolah	Jumlah Peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya	12.752

			dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	pendidikan di kabupaten morowali utara 12.752	
			5. Jumlah peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan di Kabupaten Morowali Utara 5.226	5.226
			6. Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) 505	505
			7. Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Swasta dan Negeri)	Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Swasta dan Negeri) 588	588
			8. Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) 839	839
			9. Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) 591	591
			10. Jumlah Kebutuhan Minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah Kebutuhan Minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) 505	505
			11. Jumlah Kebutuhan Minimal tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah Kebutuhan Minimal tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) 221	221
			12. Jumlah Tenaga kependidikan pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah Tenaga kependidikan pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) 839	839
			13. Jumlah Tenaga kependidikan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah Tenaga kependidikan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) 591	591
			14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik di Kabupaten Morowali Utara 424	424
			15. Jumlah pendidik pada jenjang menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik.	Jumlah pendidik pada jenjang menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik di Kabupaten Morowali Utara 191	191
			16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Swasta dan Negeri) yang memiliki ijazah D-IV atau S1,	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Swasta dan Negeri) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 128	128

			sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		
			17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 39	39
			pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		
			18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat 7	7
			19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat 14	14
		4. Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan 1.247  -----X 100%  Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Kab. Morowali Utara 2.965	42 %
			1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) di Kabupaten Morowali Utara	1
			2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	820
			3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	820
			4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) di Kabupaten Morowali Utara	26
			5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) di Kabupaten Morowali Utara	55
			6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) di Kabupaten Morowali Utara	17

			diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		
			7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah pada jenjang Kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di Kabupaten Morowali Utara	3
			8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 di Kabupaten Morowali Utara	3

### Urusan Kesehatan

No	OPD Pelaksana	IKK		Rumus/Persamaan	Capaian Kinerja
		Out come	Output		
1	2	3	4	5	6
1	RSUD	1. Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk		$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan 205}}{\text{Jumlah Penduduk di kabupaten Morowali Utara}} \times 100\%$	0,15 %
			1. Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar di Kabupaten Morowali Utara 1	1
		2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi		$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi 1}}{\text{Jumlah RS di kabupaten Morowali Utara 1}} \times 100\%$	100 %
			1. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya di Kabupaten Morowali Utara 1 Rumah Sakit	1
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan 2387}}{\text{Jumlah ibu hamil di kabupaten morowali utara 2497}} \times 100 \%$	95,5%
			1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia di Kabupaten Morowali Utara	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia di Kabupaten Morowali Utara 9 <i>Logistik, antara lain : Timbangan BB, Pengukur Tinggi Badan, Tensimeter, Metline/Pita Pengukur, Doppler/Lenec, Alat Imunisasi TT, Obat TTD, Media KIE, dan Alat Pemeriksaan Penunjang.</i>	9
			2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal 212 SDM	212
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan 2116}}{2116} \times 100 \%$	100%

		Jumlah Ibu bersalin di kabupaten morowali utara	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 5 Logistik antara lain : Partus Set, Bak Heacting, Obat Pasca Bersalin, Obat HT, dan BH	5
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar 228 SDM	228
5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 1550 -----x 100 % 1763 Jumlah bayi baru lahir di kabupaten morowali utara	87,9%
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 7 Logistik antara lain : Formulir MTBM, Vit K, Salep Mata, HB0, Termometer, Metline, dan Timbangan Bayi	7
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neo-natal esensial sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neo-natal esensial sesuai standar 200 SDM	200
6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6349 ----- x 100 % 7617 Jumlah balita di kabupaten Morowali Utara	83,4%
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 3 Logistik antara lain : Timbangan, Pengukur Tinggi Badan, dan Vitamin A	3
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar 875 SDM	875
7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 9864 ----- x 100 % 14018 Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten Morowali Utara	70,4%
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 1 Logistik antara lain : UKS Kit	1
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar 671 SDM	671
8. Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan		Jumlah orang usia 15-29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 27.465 ----- x 100 %	41,1%

skrining kesehatan sesuai standar		66.901 Jumlah usia di Kabupaten Morowali Utara	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia <i>Posbindu KIT 188 Buah</i>	188
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar <i>475 SDM Kesehatan</i>	475
9. Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 7828 -----x 100 % 10960 Jumlah orang usia 60 tahun di Kabupaten Morowali Utara	71,4%
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia <i>2 Logistik antara lain : Lansia KIT dan POSBINDU KIT</i>	2
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar <i>525 SDM</i>	525
10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 3955 ----- x 100 % 14715 Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Morowali Utara	26,9%
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia <i>5 Logistik, antara lain: POSBINDU KIT, MEDIA KIE, OBAT ANTI HT, ALKES, LAYANAN PANDU PTM.</i>	5
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar <i>276 orang</i>	276
11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2044 ----- x 100 % 5295 Jumlah penderita DM di Kabupaten Morowali Utara	38,6%
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia <i>5 logistik, antara lain: POSBINDU KIT, MEDIA KIE, OBAT ANTI DM, ALKES, LAYANAN PANDU PTM</i>	5
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar <i>276 orang</i>	276

		12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 239 -----x 100 % 246 Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten Morowali Utara	97,2%
			1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 3 Logistik, antara lain: MEDIA KIE, FORMAT SRQ, OBAT UNTUK PASIEN JIWA	3
			2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar 13 Orang	13
			13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 809 ----- x 100 % 1362 Jumlah penderita TBC di kabupaten Morowali Utara	59,4%
		14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 6 logistik, antara lain: OAT KATEGORI 1, POT DAHAK, REAGEN ZN, CATRIGE CTM, MIKROSKOP TB, ALAT CTM.	6
			2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar 91 orang	91
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 1344 ----- x 100 % 3712 Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten Morowali Utara	36,2%
			1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 6 Logistik, antara lain: REAGEN 1, REAGEN 2, REAGEN 3, TABUNG ETHA, DISPO 3, KAPAS ALKOHOL.	6
			2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar 150 Orang	150

### Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	OPD Pelaksana	IKK		Rumus/Persamaan	Capaian Kinerja
		Out come	Output		
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pekerjaan Umum	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota		Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) 26.350 Ha ----- x100% Luas kawasan permukiman rawan banjir di WSKewenangan Kab/Kota(ha) 26.350 Ha	100 %
			1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/ kota (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenang-an kabupaten/ kota (ha) 26350 Ha	26.350 Ha

			2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir diWS kewenangan kabupaten/kota (m)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir diWS kewenangan kabupaten/kota (m) 45.700 m 45.700 m
			3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kewenangan kab/kota (ha)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kewenangan kabupaten/kota 148,31 Ha 148,31 Ha
			4. Panjang pantai dikawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Panjang pantai dikawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m) 14.236 m 14.236 m
			5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kab/kota	Ada Ada
			6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan /rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten /kota	Ada Ada
			7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota 38+16+2 (Bencana)=56 56
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota 148,31 Ha ----- x100% Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota 148,31 Ha 100 %
			1. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA) 148,31 Ha 148,31 Ha
			2. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/ kota (ha)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/ kota (ha) 14.236 m 14.236 m
			3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kewenangan kab/kota (ha)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kewenangan kabupaten/kota 148,31 Ha 148,31 Ha

		4. Panjang pantai dikawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Panjang pantai dikawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m) 14.236 m	14.236 m
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kab/kota	Ada	Ada
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten /kota	Ada	Ada
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai das sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota 56	56
	3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting 5.110Ha ----- x100% luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota 5.110 Ha	100 %
		1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer kondisi baik (m) 1.830 ----- x100% Panjang jaringan Irigasi primer (m) 10.533	17,4%
		2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder kondisi baik (m) ----- x100% Panjang jaringan irigasi sekunder (m) 20.385	1,49%
		3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier kondisi baik (m) ----- x100% Panjang jaringan irigasi tersier (m) 26.035	Suket (Pertanian)
	4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi didalam sebuah kabupaten/kota. 1834 ----- x100% Jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kabupaten/kota tersebut. 29.160	62,9%
		1. Penetapan dokumen RISPAM kab./kota	(Ada)	Ada
		2. Tersusun dan ditetapkannya JAK-STRADA Kab/Kota	Ada	Ada
		3. Jumlah BUMD dan/ atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM	Ada (1)	1
		4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	

			melakukan Penyelenggaraan SPAM		SUKET
			5. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain (3)	3
		5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk+jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD 450 KK ----- x100% 36.465 Jumlah rumah di Kabupaten	1,23 %
			1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S 450 KK	450
			2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD -T	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T 450 KK	450
			3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD T	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD T 450 SR	450
			4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Suket
			5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Suket
			6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik 450	450
			7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik 450 ----- x100% 450 Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun ≤ 25 jiwa/ha	100 %
			8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IFLT ----- x100% Rumah di wilayah pengembangan SPALD	Surat Keterangan

			dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun $\leq 25$ jiwa/ha		
			9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	<p>Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah IFALD</p> $\frac{450}{450} \times 100\%$ <p>Rumah di wilayah pengembangan SPALD</p>	100 %
			10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	<p>Rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat</p> $\frac{450}{450} \times 100\%$ <p>Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD</p>	100%
			11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	<p>Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia</p> $\frac{\dots}{\dots} \times 100\%$ <p>Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan Kab/kota</p>	Surat Keterangan
			12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	<p>Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia</p> $\frac{\dots}{\dots} \times 100\%$ <p>Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan Kab/kota</p>	Surat Keterangan
			13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	<p>Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD</p> $\frac{\dots}{\dots} \times 100\%$ <p>Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab</p>	Surat Keterangan
			14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	<p>Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot 0</p> $\frac{\dots}{\dots} \times 100\%$ <p>Jumlah rumah termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-T pada kab</p>	Surat Keterangan
		6. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	<p>Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya 5</p> $\frac{\dots}{\dots} \times 100\%$ <p>Jumlah IMB yang berlaku 5</p>	100 %	
		1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	<p>Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku 5</p> $\frac{\dots}{\dots} \times 100\%$ <p>Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) 5</p>	100 %	
		2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting 5	5	
		3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	(Ada) Perda No. 3 Tahun 2017 Tentang Bangunan Gedung	Ada	
		4. Penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung	Ada	Ada	

			5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan	Surat Keterangan
			6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk kepentingan strategis daerah provinsi 1	1
			7. Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kab/ Kota	Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kab/Kota (8)	8
			8. Jumlah bangunan gedung Negara milik pemerintah kab/ kota yang di pelihara/ dirawat	Jumlah bangunan gedung Negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	Surat Keterangan
		7. Tingkat Keman-tapan Jalan kabupaten/kota		Jumlah panjang jalan dalam kondisi, mantap 550,947 (KM) ----- x100% Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota 938,760 (KM)	52 %
			1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota 938,760	938,760 Km
			2. Panjang jalan yang dibangun	Jumlah Panjang jalan yang dibangun 24,65 Km	24,65 Km
			3. Panjang jembatan yang dibangun	Panjang jembatan yg dibangun 300 M	300 M
			4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/ fungsi)	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) 138,03 km	138,03 KM
			5. Panjang jembatan yang di ganti / dilebarkan	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan 168 M	168 M
			6. Panjang jalan yang di rekon-struksi/ direhabilitasi	Jumlah Panjang jalan yang di rekon-struksi/ direhabilitasi 4,67 KM	4,67 KM
			7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	Panjang jembatan yang direhabilitasi 128 m	128 M
			8. Panjang jalan yang dipelihara	Panjang jalan yang dipelihara 5.03 Km	5.03 KM
			9. Panjang jembatan yang dipelihara	Panjang jembatan yang dipelihara 73,7 M	73,7 M
		8. Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis 50 ----- x100% Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	100 %

			50	
			1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota 1 Pelatihan 1 Pelatihan
			2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota 50 Orang 11 Orang
			3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kab/kota	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kab/kota 50 Orang 50 Orang
			4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kab/kota yang aktif dengan data termutakhir	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kab/kota yang aktif dengan data termutakhir Surat Keterangan
			5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota Surat Keterangan
			6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN Surat Keterangan
			7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya Surat Keterangan
			8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala Surat Keterangan
			9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kab/kota	Data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota Surat Keterangan
			10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/ analis konstruksi di wilayah kab/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui	Data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/ analis konstruksi di wilayah kab/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi Ada

			kerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	pemerintah lainnya.	
			11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/ analis	data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/ analis	Ada
			12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/ analis di wilayah kab/kota	Data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/ analis di wilayah kab/kota	Ada
			13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota	Data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota	Surat Keterangan
			14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui PTSP	Surat Keterangan
			15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Surat Keterangan
			16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Surat Keterangan
			17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksiyang menjadi kewenangan pengawasannya	Data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya. (ULP)	Surat Keterangan

			18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN diwilayah kab/kota	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN diwilayah kab/kota 680	680
			19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kab/kota	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota 680	680
			20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek diwilayah Kab/Kota	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek diwilayah Kab/Kota 680	680
			21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota -	-
			22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui (PTSP)	Surat Keterangan
			23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dgn kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dgn kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya (ULP)	Surat Keterangan
			24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Surat Keterangan
			25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dgn segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dgn segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya (ULP)	Surat Keterangan
		9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi - ----- x100% Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya -	100%

## Urusan Perumahan Rakyat

No	OPD Pelaksana	IKK		Rumus/Persamaan	Capaian Kinerja
		Out come	Output		
1	2	3	4	5	6
	Dinas Pekerjaan Umum	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/ kota		<p>Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n</p> <p>----- x100%</p> <p>Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n</p>	Suket
			1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya 2803 Unit	2.803
			2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Jumlah rumah yang terkena bencana alam Rusak Ringan 10, Rusak Sedang 4 dan Berat 8 Unit	22
			3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam KK = 98 KK Jiwa = 303 Jiwa Rumah = 22 unit	KK = 98 KK Jiwa = 303 Jiwa Rumah = 22 unit
			4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi 0 Unit	
			5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Surat Keterangan
			6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/ relokasi sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/ relokasi sesuai dengan rencana aksi	Surat Keterangan
			7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Surat Keterangan
			8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi KK = 98 KK Jiwa = 303 Jiwa Rumah = 22 unit	KK = 98 KK Jiwa = 303 Jiwa Rumah = 22 unit
			9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Surat Keterangan
		2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		<p>Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan+ RumahTangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni</p> <p>----- x100%</p> <p>Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi criteria penerima pelayanan</p>	Surat Keterangan

		1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian asset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian asset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Surat Keterangan
		2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Surat Keterangan
		3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Surat Keterangan
		4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Surat Keterangan
		5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Surat Keterangan
		6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Surat Keterangan
	3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani		$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) 30,00 Ha}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha 30,00}} \times 100\%$	100 %
		1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha 30,00	30,00Ha
		2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 219 unit	219
		3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh 30,0 ha	30,0 ha
	4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni 7.084}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten Morowali Utara 29.160}} \times 100\%$	24,29 %
		1. Jumlah rumah di kab/kota	Jumlah rumah di kab Morowali Utara 29.160 unit	29.160
		2. Jumlah unit PK RTLH	Jumlah unit PK RTLH 219 Unit	219
		3. Jumlah rumah tidak		7.084

			layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni 7.084 Unit	
			4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Surat Keterangan
			5. Rasio rumah dan KK	Jumlah KK 38.884 ----- x100% Jumlah total unit rumah kabupaten kota 29.160	133,34 %
			6. Jumlah rumah pembangunan baru	Jumlah rumah pembangunan baru	Suket
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU 95 unit ----- x100% Jumlah unit rumah kab/kota 95 Unit	100%
			1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU 95 unit	95
			2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum 1.834 unit	1.834
			3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan 95 unit	95
			4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site)	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site) 19.433	19.433
			5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Surat Keterangan
			6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU 20.253 (pehubungan)	20.253
			7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Jumlah pengembang yang tersertifikasi (PTSP)	Surat Keterangan
			8. Jumlah pengembang yang terregistrasi	Jumlah pengembang yang terregistrasi (PTSP)	Surat Keterangan
			9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan (PTSP)	Surat Keterangan

### Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	OPD Pelaksana	IKK		Rumus/Persamaan	Capaian Kinerja
		Out come	Output		
1	2	3	4	5	6
		1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		Jumlah pengaduan yang ditangani 4 ----- x100% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk 4	100 %
			1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/ Kota yang ditangani	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/ Kota yang ditangani 4	4
			2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan 1.200 orang	1.200

		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 26 Perda	26
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS 5 orang	5
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum (Ada)	Ada
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	sarana prasarana minimal Ada	Ada
	2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan 12 ----- x100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi 12	100 %
	3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 3.200 jiwa	3.200 jiwa
	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal		Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun 1 ----- x100% Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan 1	100 %
	2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 22.316 ----- x100% 66.355 Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	33,63%
	4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 22.316	22.316
	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal		Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun 1 ----- x100% Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan 1	100%
	2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal		Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun 1 ----- x100% Jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan 1	100%
	3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan		Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan 27 ----- x100% Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana 27	100 %
	4. Persentase warga negara yang ikut		Jumlah warga negara yang ikut pelatihan 22	0,03 %

			pelatihan	----- x100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana 66.355	
			5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana pra-sarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops ----- x100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana 66.355	Surat Keterangan
			6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan ----- x100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana 66.355	Surat Keterangan
		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 2003 Jiwa	2.003
			1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB ----- x100% Jumlah seluruh penetapan status KLB	Surat Keterangan
			2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana ----- x100% Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	Surat Keterangan
			3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana 381 ----- x100% 381 Jumlah seluruh petugas dalam penanganan darurat bencana	100 %
			4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana 229 ----- x100% Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana 229	100 %
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman dikabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah 11 ----- x100% 13 Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	84,61%
			1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kab/kota 11	11

			kab/kota		
			2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Jumlah Pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan 2	2
			3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kec.	Jumlah aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kec. 18 Orang	18
			4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Tersedianya Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa Ada	Ada
			5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi 46	46
			6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana di maksud Permendagri No. 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Permendagri No. 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran 18	18
			7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Surat Keterangan
			8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran 18	18
		7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran 1 Jam 3 Menit	Ada

## Urusan Sosial

No	OPD Pelaksana	IKK		Rumus/Persamaan	Capaian Kinerja
		Out come	Output		
1	2	3	4	5	6
	Dinas Sosial Daerah Kabupaten	1. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 1.137  ----- x100% Populasi penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan terlantar 6.820	17%
			1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki 3	3
			2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM 7.855 Orang	7.855
			3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibentuk 1 (Satu) tim Taruna Siaga Bencana (TAGANA) berjumlah 23 Orang	23
			4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Tidak Ada
			5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki 4 Unit	4
			6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi 372 Orang	372
			7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar 6 Unit	6
			8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Surat Keterangan
			9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu 1 Orang	1
10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	Surat Keterangan			

			11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Surat Keterangan
			12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Surat Keterangan
			13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Surat Keterangan
			14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/ atau TKS dan/ atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah pekerja sosial profesional dan/ atau TKS dan/ atau relawan sosial yang disediakan 82	82
			15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/ atau pusat kesejahteraan sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/ atau pusat kesejahteraan sosial 1 orang	1 Orang
			16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat 2 Bimbingan	2 Bimbingan
			17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Surat Keterangan
			18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Surat Keterangan
			19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Surat Keterangan
			20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Surat Keterangan

			21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Surat Keterangan
		2. Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota		Jumlah korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran 59 ----- x100% Populasi korban bencana alam dan social di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 59	100 %
			1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan 59 Orang	59
			2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang 59 Orang	59
			3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	6 Rumah Slingah
			4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan 402 Orang	402
			5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Surat Keterangan
			6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan social yang tersedia	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan social yang tersedia 82 Pekerja Sosial	82

### **C. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya**

Lampiran Berita Acara Hasil EPPD Kabupaten Morowali Utara 2022

#### Permasalahan

Uraian permasalahan pada saat pelaksanaan evaluasi terkait capaian kinerja terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Morowali Utara, antara lain sebagai berikut:

#### A. CAPAIAN KINERJA MAKRO (CKM)

- a. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara mencapai pada angka 36,42%
- b. Ketimpangan Pendapatan (gini ratio) 0,27%

#### B. CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN (CKUP) WAJIB PELAYANAN DASAR

##### 1. Urusan Kesehatan

- a. Persentase jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten Morowali Utara hanya mencapai 1,42%.
- b. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar hanya mencapai 41,05%.
- c. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar hanya mencapai 26,66%.
- d. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar hanya mencapai 38,60%.
- e. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV yang sesuai standar hanya mencapai 36,21%

##### 2. Urusan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang

- a. Jumlah komulatif masyarakat yang rumah tangganya mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dalam Kabupaten Morowali Utara hanya mencapai 6,29%.
- b. Persentase rumah tangga yang memperoleh air limbah domestik hanya mencapai 1,54%.
- c. Tingkat kemantapan jalan Kabupaten Morowali Utara hanya mencapai 40,98%

##### 3. Urusan Sosial

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator SPM) hanya mencapai 16,67%.

### C. CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

#### 1. Urusan Ketenagakerjaan

Persentase tenaga kerja bersertifikat berkompentensi hanya mencapai 4,79%

#### 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase ARG pada belanja langsung APBD hanya mencapai 0.03%

b. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten Morowali Utara hanya mencapai 0,08%

c. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) hanya mencapai 10,62%

#### 3. Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama hanya mencapai 30,43%.

#### 4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Persentase pengentasan desa tertinggal hanya mencapai 25,93%

b. Persentase status jasa mandiri baru mencapai 8,33%

#### 5. Urusan Pengendalian penduduk dan KB

a. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate/mCPR) hanya mencapai 33,15%.

b. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi ( unmet need) hanya mencapai 22,01%.

#### 6. Urusan Kominfo

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota hanya mencapai 24,34%.

#### 7. Urusan Koperasi dan UKM

a. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas masih rendah yaitu berada di 10,29%

b. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha hanya mencapai 2,49%.

#### 8. Urusan Penanaman Modal

Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota hanya mencapai -6,79%.

#### 9. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri masih cukup rendah 0,17%.

b. Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan hanya mencapai 7,50%.

c. Peningkatan prestasi olahraga hanya mencapai 6,00%.

10. Urusan Persandian  
Tingkat keamanan informasi pemerintah hanya 0,00%.
11. Urusan Perpustakaan  
Nilai tingkat kegemaran membaca masih sangat rendah 1,00%
12. Urusan kearsipan
  - a. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional hanya mencapai 47,50%.
  - b. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan negara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat hanya mencapai 1,00%.

#### D. CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Urusan Pariwisata  
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD hanya mencapai 0,02%.
2. Urusan Pertanian  
Produktivitas pertanian per hektar per tahun hanya mencapai 0,04%.

#### E. CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN (PENUNJANG)

1. Urusan Perencanaan dan Keuangan
  - a. Rasio belanja di luar guru dan tenaga kesehatan hanya mencapai 13,68%.
  - b. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai 48,14%.
  - c. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah hanya mencapai level 2,00
  - d. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) hanya mencapai level 2,00
  - e. Opini Laporan Keuangan hanya mencapai level 1,00.
2. Urusan Pengadaan  
Presentase jumlah
  - a. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif hanya mencapai 11,99%.
  - b. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan hanya mencapai 33,68%.
  - c. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah hanya mencapai 49,17%.
3. Urusan Kepegawaian
  - a. Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) hanya mencapai 16,75%.
  - b. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) hanya mencapai 36,61%.

c. Urusan Manajemen Keuangan

Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya hanya mencapai 19,66%.

F. CAPAIAN URUSAN YANG TIDAK TERISI (TDI)

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi karena tidak ada kecelakaan konstruksi yang terjadi dan data tidak tersedia karena kegiatan belum pernah dilaksanakan oleh dinas (Surat Keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah tanggal tanpa nomor dan tanggal).

2. Urusan Perumahan

a. Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana bagi kabupaten/kota karena tidak ada unit rumah yang ditangani (Surat Keterangan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Morowali Utara tanpa nomor dan tanggal).

b. Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota karena tidak memiliki data karena bidang perumahan tidak menangani program fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak (Surat keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah tanggal tanpa nomor dan tanggal).

3. Urusan Pariwisata

a. Presentase pertumbuhan jumlah wisatawan manca negara berkebangsaan karena berdasarkan data kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 – 2023 tidak terdapat wisatawan mancanegara sejak tahun 2020 sampai dengan 2023.

b. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku karena capaian kinerjanya hanya 0% (Surat Keterangan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara tanpa nomor dan tanggal).

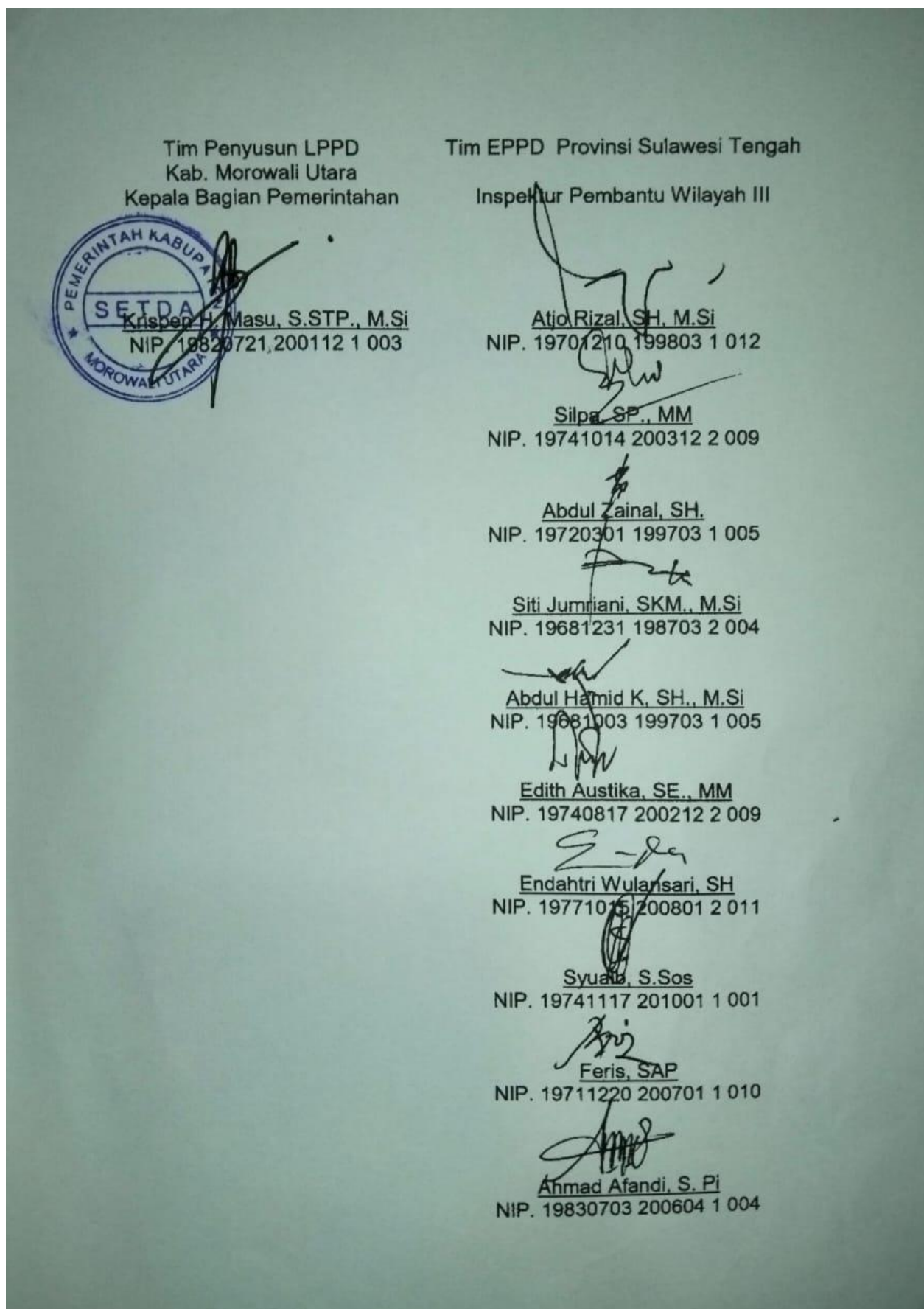
G. CAPAIAN URUSAN PILIHAN YANG SUDAH DITARIK KE PROVINSI

1. Urusan Kehutanan

Surat Keterangan Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Setdakab Morowali Utara tanggal 21 Februari 2023.

2. Urusan ESDM

Surat Keterangan Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Setdakab Morowali Utara tanggal 21 Februari 2023.



**D. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah serts Realisasi Penerimaan Menurut Jenis Penerimaan dan Realisasi Pengeluaran Menurut Jenis Pengeluaran, dan Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan**

Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan :

Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara bersumber dari beberapa jenis pendapatan yakni Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Kemudian Pendapatan Transfer yang terdiri Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa) dan Pendapatan Transfer Antar daerah (Pendapatan Bagi Hasil). Pendapatan daerah juga bersumber dari jenis pendapatan Lain-Lain Yang Sah seperti Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan APBD Tahun 2023 berikut realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan.

**Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>Pendapatan</b>	<b>1.268.912.217.458,00</b>	<b>1.208.791.970.076,42</b>	<b>95,26</b>
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah :</b>	<b>198.931.000.747,00</b>	<b>134.642.349.464,42</b>	<b>67,68</b>
	- Pajak Daerah	84.670.335.500,00	35.305.535.224,00	41,70
	- Retribusi Daerah	58.168.751.621,00	34.752.147.686,00	59,74
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.500.000.000,00	3.864.163.872,00	110,40
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.591.913.626,00	60.720.502.682,42	115,46
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.069.981.216.711,00</b>	<b>1.074.149.620.612,00</b>	<b>99,32</b>
	- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.032.336.356.645,00	1.031.738.139.512,00	99,94
	- Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.644.860.066,00	42.411.481.100,00	112,66
	<b>Jumlah</b>	<b>1.268.912.217.458,00</b>	<b>1.208.791.970.076,42</b>	<b>95,26</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 sebesar Rp. 198.931.000.747,00 hingga 31 Desember 2023 dapat terealisasi sebesar Rp.134.642.349.464,42 maka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 67,68%. Dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 85.644.305.726,10 terjadi kenaikan sebesar Rp. 48.998.043.738,32 atau 57,21%.

##### 1.) Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah sangat ditentukan adanya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah dan seringnya dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu dengan meninjau kembali obyek-obyek pajak yang belum dibayar sesuai dengan perda dan melakukan pendataan terhadap obyek pajak yang belum terpungut dengan rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Perincian Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah  
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pajak Hotel	200.000.000,00	182.041.100,00	91,02
2	Pajak Restoran	1.500.000.000,00	2.121.715.078,00	141,45
3	Pajak Hiburan	25.000.000,00	8.920.000,00	35,68
4	Pajak Reklame	100.000.000,00	99.493.191,00	99,49
5	Pajak Penerangan Jalan	37.000.000.000,00	16.899.697.283,00	45,67
6	Pajak Air Dan Tanah	15.000.000,00	0,00	0
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	31.830.335.500,00	5.872.137.110,00	18,45
8	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBBP2)	10.000.000.000,00	5.646.019.379,00	56,46
9	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.000.000.000,00	4.475.512.083,00	111,89
<b>Jumlah</b>		<b>84.670.335.500,00</b>	<b>35.305.535.224,00</b>	<b>41,70</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara

##### 2.) Retribusi Daerah

Adapun perincian pendapatan dari retribusi Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Perincian Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah  
Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
<b>Retribusi Daerah</b>	<b>58.168.751.621,00</b>	<b>34.752.147.686,00</b>	<b>59,74</b>
I. Retribusi Jasa Umum	5.963.751.621,00	6.807.351.030,00	114,15
II. Retribusi Jasa Usaha	525.000.000,00	312.512.204,00	59,53
III. Retribusi Perizinan Tertentu	51.680.000.000,00	27.632.284.452,00	53,47

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara

**3.) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) yang penerimaannya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pada tabel berikut :

**Perincian Target dan Realisasi Penerimaan Hasil  
Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan  
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	3.500.000.000,00	3.864.163.872,00	110,40
<b>J U M L A H</b>		<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.864.163.872,00</b>	<b>110,40</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara, 2023

**4.) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Perincian Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perincian Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah  
Yang Sah Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Penerimaan Jasa Giro	2.000.000.000,00	4.143.818.016,00	207,19
2	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.630.000.000,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.100.036.817,00	1.760.001.994,00	83,81
4	Pendapatan dari Pengembalian	7.050.000.000,00	7.981.355.429,42	113,21
5	Pendapatan BLUD	31.636.248.379,00	38.673.695.152,00	122,24
6	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	8.175.628.430,00	8.161.632.091,00	99,83
<b>Jumlah</b>		<b>52.591.913.626,00</b>	<b>60.420.502.628,42</b>	<b>115,46</b>

**b. Pendapatan Transfer**

Target Pendapatan Transfer Tahun 2023 sebesar Rp. 1.069.981.216.711,00 hingga 31 Desember 2023 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.074.149.620.612,00 atau 100,39% Pendapatan transfer terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah.

Adapun perincian Pendapatan Transfer Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Perincian Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :</b>	<b>1.032.336.356.645,00</b>	<b>1.031.738.139.512,00</b>	<b>99,94</b>
	- Dana Perimbangan	921.782.006.645,00	921.183.789.512,00	98,69
	- Dana Desa	110.554.350.000,00	110.554.350.000,00	100,00
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar daerah</b>	<b>37.644.860.066,00</b>	<b>42.411.481.100,00</b>	<b>112,66</b>
	- Pendapatan Bagi Hasil	35.304.860.066,00	40.134.041.100,00	113,68
	- Bantuan Keuangan	2.340.000.000,00	2.277.440.000,00	97,33
	<b>Jumlah</b>	<b>1.069.981.216.711,00</b>	<b>1.074.149.620.612,00</b>	<b>100,39</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara

**Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**

Kebijakan Umum Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 menganut prinsip *money follow program prioritas* atau anggaran berbasis program prioritas pembangunan daerah serta prioritas lainnya sesuai urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan. Selain itu kebijakan belanja diarahkan untuk memenuhi standar pelayanan minimal dana operasional, mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijanjikan dari aspirasi masyarakat lewat Musrenbang, melaksanakan alokasi dana desa sesuai peraturan perundang-undangan dan belanja daerah berdasarkan prioritas kebutuhan rutin daerah yang bersifat mengikat serta mengupayakan efisiensi untuk belanja kebutuhan aparatur dalam APBD walaupun jumlah aparatur terus meningkat.

Dalam pengelolaan belanja daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tetap berpegang pada pelaksanaan anggaran yang efisien dan efektif serta mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai *stakeholdernya* untuk menjaga eksistensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dinamis, terarah dan terkendali. Dalam belanja tersebut harus disertai tolak ukur kinerja yang terukur pada indikator hasil (*outcome*) dan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi dari setiap urusan pemerintahan. Pengeluaran belanja daerah diarahkan untuk membiayai berbagai pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan umum serta kegiatan pemerintah daerah lainnya.

Struktur APBD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara mengklasifikasikan Belanja menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 1.417.100.225.830,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.305.755.048.355,53 atau mencapai 92,14% yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023  
Periode 01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.417.100.225.830,00</b>	<b>1.305.755.048.355,53</b>	<b>92,14</b>
1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>929.933.776.562,00</b>	<b>858.553.146.177,26</b>	<b>92,32</b>
	Belanja Pegawai	459.585.031.337,00	421.119.650.438,00	91,63
	Belanja Barang dan Jasa	407.227.903.085,00	380.042.774.294,00	86,52
	Belanja Bunga	1.967.811.331,00	1.659.124.491,00	84,31
	Belanja Hibah	25.917.718.109,00	22.516.369.666,00	86,88
	Belanja Bantuan Sosial	35.235.312.700,00	33.215.227.288,26	94,27
2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>267.160.777.374,00</b>	<b>231.988.131.589,27</b>	<b>86,83</b>
	Belanja Modal Tanah	4.152.591.554,00	1.110.890.900,00	26,75
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.767.501.151,00	36.930.658.470,00	88,42
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.757.230.741,00	80.182.171.788,27	80,38
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.382.253.928,00	113.670.285.431,00	93,65
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	94.200.000,00	94.125.000,00	99,92
	Belanja Modal Aset Lainnya	7.000.000,00	0,00	0
3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.150.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>4,44</b>
4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>216.855.671.894,00</b>	<b>215.073.770.589,00</b>	<b>99,18</b>
	Belanja Bagi Hasil	944.103.854,00	933.454.571,00	98,87
	Belanja Bantuan Keuangan	215.911.568.040,00	214.140.316.018,00	99,18
	<b>Jumlah</b>	<b>1.417.100.225.830,00</b>	<b>1.305.755.048.355,53</b>	<b>92,14</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara

## 1. BELANJA OPERASI.

Belanja Operasi Kabupaten Morowali Utara pada Tahun Anggaran 2023 mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

### a). *Belanja Pegawai*

Belanja Pegawai Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 459.585.031.337,00 dan terealisasi sebesar Rp. 421.119.650.438 atau mencapai 91,63% dengan perincian sebagai berikut :

#### Anggaran Dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	276.697.884.996,00	246.251.500.501,00	89,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	99.277.337.787,00	95.400.857.566,00	96,10
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	55.769.208.974,00	55.055.678.452,00	93,32
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.870.786.348,00	10.835.454.019,00	99,67
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	194.676.930,00	173.075.819,00	88,90
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.161.500.000,00	1.080.600.000,00	93,03
7	Belanja Pegawai BLUD	15.613.636.302,00	12.322.484.081,00	78,92
<b>JUMLAH</b>		<b>459.585.031.337,00</b>	<b>409.306.626.873,00</b>	<b>91,63</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara

### b). *Belanja Barang dan Jasa*

Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 407.227.903.085,00 dan terealisasi sebesar Rp. 380.042.774.294,00 atau 93,32% dengan rincian sebagai berikut :

#### Anggaran Dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Barang	91.697.307.013,00	86.155.198.379,00	93,96
2	Belanja Jasa	160.092.991.198,00	143.177.571.679,00	89,43
3	Belanja Pemeliharaan	44.618.514.146,00	43.001.431.073,00	96,38
4	Belanja Perjalanan Dinas	76.883.411.580,00	72.551.707.887,00	94,37
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	1.659.555.000,00	1.619.484.980,00	97,59
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	18.481.072.295,00	17.284.204.955,00	93,52
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	13.795.051.853,00	16.253.175.341,00	117,82
<b>Jumlah</b>		<b>407.227.903.085,00</b>	<b>380.042.774.294,00</b>	<b>93,32</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara

c). *Belanja Bunga*

Belanja Bunga Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 1.967.811.331,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.659.124.491,00 atau mencapai 84,31% dengan rincian sebagai berikut :

**Anggaran Dan Realisasi Belanja Bunga  
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	1.967.811.331,00	1.659.124.491,00	84,31
<b>Jumlah</b>		<b>1.967.811.331,00</b>	<b>1.659.124.491,00</b>	<b>84,31</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara

d). *Belanja Hibah*

Belanja Hibah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 25.917.718.109,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.516.369.666,00 atau mencapai 86,88% dengan rincian sebagai berikut :

**Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah  
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	9.867.494.013,00	9.666.957.000,00	97,97
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	15.398.444.096,00	12.197.632.666,00	79,21
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	651.780.000,00	651.780.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>25.917.718.109,00</b>	<b>22.516.369.666,00</b>	<b>86,88</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara

e). *Belanja Bantuan Sosial*

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Morowali Utara terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat. Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 35.235.312.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 33.215.227.288,26 atau mencapai 94,18%. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Anggaran Dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial  
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	12.862.877.700,00	11.875.008.400,00	92,32
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	22.372.435.000,00	21.340.218.888,26	95,39
<b>Jumlah</b>		<b>35.235.312.700,00</b>	<b>33.215.227.288,26</b>	<b>94,27</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara

**2. BELANJA MODAL**

Belanja Modal Kabupaten Morowali Utara pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 267.160.777.374,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 229.851.836.221,27 atau mencapai 84,28%. Belanja modal terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset lainnya.

a). *Belanja Modal Tanah*

Belanja Modal Tanah pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.4.152.591.554,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.110.890.900,00 atau sebesar 26,75%.

b). *Belanja Modal Peralatan dan Mesin*

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 41.767.501.151,00 dan terealisasi sebesar Rp.36.930.568.470,00 atau sebesar 88,42%. Adapun perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Kabupaten Morowali Utara  
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Besar	36.609.000,00	35.500.000,00	96,97
2	Belanja Modal Alat Angkutan	4.508.123.000,00	3.496.981.100,00	77,57
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	52.848.840,00	52.848.600,00	100,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	1.883.555.000,00	1.727.590.520,00	91,72
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.787.752.602,00	15.355.110.317,00	86,32
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.111.819.249,00	2.863.690.885,00	92,03

7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.222.352.302,00	2.197.267.554,00	98,87
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.817.789.863,00	1.352.625.863,00	74,41
9	Belanja Modal Komputer	9.590.063.443,00	9.095.377.779,00	94,84
10	Belanja Modal Alat Pengeboran	2.101.176,00	2.101.176,00	100,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	108.384.548,00	106.373.348,00	98,14
12	Belanja Modal Rambu-rambu	600.000.000,00	599.089.200,00	99,85
13	Belanja Modal Peralatan Olah Raga	46.102.128,00	46.102.128,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>41.767.501.151,00</b>	<b>36.930.658.470,00</b>	<b>88,42</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara

c). *Belanja Modal Gedung dan Bangunan*

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 99.757.230.741,00 dan terealisasi sebesar Rp. 80.182.171.788,27 atau sebesar 80,38%. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	96.972.497.856,00	77.451.712.195,27	79,87
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.784.732.885,00	2.730.459.593,00	98,05
<b>JUMLAH</b>		<b>99.757.230.741,00</b>	<b>80.182.171.788,27</b>	<b>80,38</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara

d) *Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi*

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 121.382.253.928,00 dan terealisasi sebesar Rp. 113.670.285.431,00 atau sebesar 93,65%. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	92.747.059.006,00	86.057.885.870,00	92,79
2	Belanja Modal Bangunan Air	20.003.519.922,00	19.355.718.711,00	96,76
3	Belanja Modal Instalasi	87.675.000,00	87.536.000,00	99,84
4	Belanja Modal Jaringan	8.544.000.000,00	8.169.144.850,00	95,61
<b>JUMLAH</b>		<b>121.382.253.928,00</b>	<b>113.670.285.431,00</b>	<b>93,65</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara

e) *Belanja Modal Aset Tetap Lainnya*

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 94.200.000,00 dan terealisasi sebesar 94.125.000,00 atau mencapai 99,92%. Adapun perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	94.200.000,00	94.125.000,00	99,92
<b>JUMLAH</b>		94.200.000,00	94.125.000,00	<b>99,92</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara

f) *Belanja Modal Aset Lainnya*

Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000,00 tidak terealisasi.

**3. BELANJA TIDAK TERDUGA**

Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 3.150. 00.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 140.000.000,00 atau mencapai 4,44%, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Anggaran Dan Realisasi Belanja Tidak Terduga  
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak terduga	3.150.000.000,00	140.000.000,00	4,44
<b>JUMLAH</b>		3.150.000.000,00	140.000.000,00	<b>4,44</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara

**4. BELANJA TRANSFER**

Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Morowali Utara mencakup Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Untuk perincian belanja transfer dapat dilihat pada tabel berikut:

**Anggaran Dan Realisasi Biaya Transfer  
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Belanja Bagi Hasil</b>				
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	512.743.648,00	506.340.755,00	98,75

2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	431.360.206,00	427.113.816,00	99,02
<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>				
2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	215.911.568.040,00	214.140.316.018,00	99,18
<b>JUMLAH</b>		<b>216.855.671.894,00</b>	<b>215.073.770.589,00</b>	<b>99,18</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Morowali Utara

### 1.3.1. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan menurut jenis pembiayaan daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

#### a. Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dan Penerimaan Pinjaman Daerah.

#### b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah berupa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada PT. Bank Sulteng dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang jatuh Tempo.

Realisasi Pembiayaan menurut jenis pembiayaan daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

#### Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>				
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	189.973.904.628,00	190.974.549.361,64	100,53
<b>JUMLAH</b>		<b>189.973.904.628,00</b>	<b>190.974.549.361,64</b>	<b>100,53</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>				
1	Penyertaan Modal Daerah	4.200.000.000,00	3.500.000.000,00	83,33
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	37.585.896.256,00	37.585.896.256,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>41.785.896.256,00</b>	<b>41.085.896.256,00</b>	<b>98,32</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>148.188.008.372,00</b>	<b>149.888.653.105,64</b>	<b>101,15</b>
<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Akhir Tahun Berkenan</b>		<b>0,00</b>	<b>52.925.574.826,53</b>	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Morowali Utara

## E. Inovasi Daerah

### Penetapan Inovasi Daerah Yang Diikutsertakan Dalam Lomba (IGA) Inovative Government Award Tahun 2023

<b>NAMA INOVASI</b>	<b>INISIATOR/INVENTOR</b>
LIP3STIK (Layanan Informasi Penyusunan Program Anggaran Pelaporan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Pusat Informasi Kesehatan Studio Digital Pariwara Kesehatan Mawongko Aroa	Puskesmas Kolonodale
JELADA MELIAT (Jemput Bola Dahak Melalui Telinga TB)	Puskesmas Pandauke
GASPUL BERSIN (Gerakan Sehat Peduli Uemalingku, Beriman, dan Bersinergi)	Puskesmas Pandauke
Optimalisasi Pelayanan Pemanfaatan Ruang Melalui Penyusunan Database Kawasan Permukiman Berbasis Sistem Informasi Geografis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MENYAPA MORUT (Medianya Perempuan dan Anak Morowali Utara)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SENJA ANDINI (Seputar Edukasi dan Informasi Remaja Anti Nikah Dini)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Hotel dan Restoran Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Morowali Utara	Badan Pendapatan Daerah
Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Publikasi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah
SIPAKET ANDA (Sistem Pelayanan Administrasi Kecamatan dan Desa)	Kecamatan Lembo
Peningkatan Pengetahuan Bantuan Hidup Dasar pada Siswa Kelas 3 SMA Negeri 1 Soyojaya	UPT Puskesmas Tambayoli

## F. Penutup

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan sesuai dengan isi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 1.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan hasil dari proses koordinasi, kerjasama dan partisipasi semua stakeholder pembangunan mulai dari pemerintah daerah, DPRD, para pegiat perekonomian dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, fungsi dan tugas masing-masing yang didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan realisasi dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Morowali Utara bersama DPRD berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Pada tahun 2023 sudah ada beberapa keberhasilan yang dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Walaupun harus diakui juga banyak hal masih terdapat kekurangan bahkan relatif masih jauh dari yang dicita-citakan. Permasalahan pembangunan yang dihadapi kedepan semakin penuh tantangan yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi. Untuk itu patut kiranya diperkuat komitmen dan dedikasi melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara termasuk jajaran pemerintahan desa dan masyarakat Kabupaten Morowali Utara secara keseluruhan serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan tahun 2023.

Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi pemerintahan maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja kita pada tahun-tahun mendatang.

Demikian LPPD ini disampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan petunjuk dan melindungi kita semua dalam mengabdikan diri dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang sejahtera dan berdaya saing melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional.

Sekian dan terima kasih.



DR. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS